

Elemen Sukses Penerapan E-Government Pada Era Covid-19 Di Kominfo Riau

Stefany Faulina

Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
Email: stefanyfaulina6@gmail.com

Syamsir

Universitas Negeri Padang
Email: syamsirsaili@yahoo.com

Rima Utari

Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
Email: utari0405@gmail.com

Siti Fazira Aranda

Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
Email: sitifaziraa3@gmail.com

Azaki Fevaregi

Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
Email: azakifevaregi.af@gmail.com

Ari Rinaldo

Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
Email: aririnaldo2001@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how the elements of successful implementation of E-Government in the Covid-19 era at Kominfo Riau, as well as find out how E-Government was implemented at Kominfo Riau during the Covid-19 period and after this Covid-19 period. In addition, this research also aims to see what innovations support the successful implementation of E-Government at Kominfo Riau. The research method used is descriptive qualitative method which describes the research based on the description of the actual situation. This research was conducted on Riau Kominfo employees and leaders, with data collection techniques carried out by interviewing the Head of Service and employees at the Riau Diskominfo Office. The results of the study show that the successful elements of implementing E-Government in the Covid-19 era at Kominfo Riau are supported by the implementation of government innovations which include: (1) Smart Governance Dimensional Innovations, (2) Smart Society Dimensional Innovations, (3)

Received September 30, 2022; Revised Oktober 12, 2022; November 26, 2022

* Stefany Faulina, stefanyfaulina6@gmail.com

Smart Dimension Innovations Environment, (4) Smart Economy Dimension Innovation, (5) Smart Living Dimension Innovation, and (6) Smart Branding Dimension Innovation. Some of the implemented innovations still encounter a number of obstacles that need to be addressed directly by the Riau Kominfo and the Riau provincial government.

Keywords: *E-Government, covid-19, Kominfo Riau.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana elemen sukses penerapan *E-Government* pada era Covid-19 di Kominfo Riau, sekaligus mengetahui bagaimana penerapan *E-Government* di Kominfo Riau saat masa Covid-19 dan setelah masa Covid-19 ini. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat inovasi-inovasi apa saja yang mendukung kesuksesan penerapan *E-Government* di Kominfo Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang menjabarkan penelitian berdasarkan penggambaran keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan pada pegawai dan pimpinan Kominfo Riau, dengan Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara pada Kepala Dinas beserta pegawai yang ada di Kantor Diskominfo Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen sukses penerapan E-Government pada era Covid-19 di Kominfo Riau didukung oleh penerapan inovasi-inovasi pemerintahan yang meliputi : (1) Inovasi Dimensi Smart Governance, (2) Inovasi Dimensi Smart Society, (3) Inovasi Dimensi Smart Environment, (4) Inovasi Dimensi Smart Economy, (5) Inovasi Dimensi Smart Living, dan (6) Inovasi Dimensi Smart Branding. Beberapa inovasi yang diterapkan ini masih menemui beberapa kendala yang perlu ditangani langsung oleh Kominfo Riau serta pemerintah Provinsi Riau.

Kata Kunci: *E-Government, covid-19, Kominfo Riau.*

PENDAHULUAN

Secara konseptual, E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain, didalamnya melibatkan otomisasi dan komputerisasi pada prosedur paper based yang akan mendorong cara baru dalam kepemimpinan, cara baru dalam mendiskusikan dan menetapkan strategi, cara baru dalam transaksi bisnis, cara baru dalam mendengarkan warga dan komunitas, serta cara baru dalam mengorganisasi dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan pemberian fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi kepada

masyarakat umum, serta membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tidak dapat cegah, keadaan seperti ini menuntut warga negara untuk terus bergerak dinamis dalam menghadapi setiap tantangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, hingga pada akhirnya perkembangan teknologi dan Informasi mempengaruhi perubahan segala aspek kehidupan bernegara baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan dan keamanan, politik, dan pemerintahan. Dalam mengatasi hal tersebut maka pemerintah memberlakukan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pengembangan E-Government dilakukan dalam rangka mencapai good government, yang menurut Bank Dunia didefinisikan sebagai layanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, serta pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publik. Di tingkat nasional, inisiatif penerapan E-Government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (telekomunikasi, media dan informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi.

Penerapan Electronic Government dalam rangka mewujudkan Good Government adalah salah satu wujud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif dalam memberikan informasi. Dalam hal ini Pemerintah sebagai penyelenggara Good Government, masih banyak menemukan hambatan dalam penerapannya. Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya Pemerintah mempunyai regulasi hukum yaitu ketentuan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan perintah dibentuknya Undang-undang organik tentang pemerintahan di daerah.

Sejak dikeluarkannya PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, beberapa wilayah di tanah air memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang menyebabkan sekolah dan tempat kerja

diliburkan, kegiatan keagamaan atau ibadah bersama dibatasi dan kegiatan-kegiatan di tempat umum atau fasilitas publik juga dibatasi. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerumunan banyak orang agar resiko penularan virus ini dapat ditekan. Pemberlakuan Pembatasan Sosial di Indonesia juga membawa dampak pada aksesibilitas pelayanan publik. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Surat Edaran ini memberlakukan *work from home* (bekerja di rumah) secara bergantian bagi para pegawai di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini mempengaruhi aksesibilitas pelayanan publik. Pelayanan secara konvensional yakni dengan bertatap muka secara langsung mulai dibatasi jumlahnya dan selebihnya dibantu oleh sistem secara online. Pelayanan secara online ini merupakan hasil penerapan dari E-Government. (Lumbanraja, 2020). Pandemi Covid-19 yang muncul beberapa bulan yang lalu dan pertama kali muncul di kota wuhan telah membawa perubahan yang sangat signifikan bagi kehidupan di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu korban yang positif terus mengalami penambahan setidaknya ada dua jenis korban yang terindikasi positif yakni pasien yang memiliki gejala seperti flu dan ada pula yang pasien positif tanpa gejala. Pasien tanpa gejala inilah yang menjadi masalah besar sebab seseorang bisa positif sedangkan mereka tidak merasakan gejala apapun dan korban seperti ini pun akan mudah menularkan kepada orang lain sebab tidak di ketahuinya bahwa dia terjangkit Covid-19 tersebut.

Berkaitan dengan berbagai masalah yang di hadapi pemerintah Indonesia bahkan dunia saat ini khususnya di tengah merabahnya Covid-19 yang menjadi salah tantangan pemerintah untuk terus mencari cara agar hal tersebut tidak lagi mengancam ketertiban, keamanan dan kesehatan warga negara. Covid-19 telah menyebar kesemua daerah yang ada di Indonesia, tak ada satupun daerah yang luput dari penyebaran Covid-19 ini termasuk Provinsi Riau.

Covid-19 di Provinsi Riau termasuk kedalam daerah terparah yang terparah Covid 19 di Pulau Sumatera. Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang melakukan penanganan kasus Covid 19 yang termasuk cepat dan dalam hal penanganan Covid-19 itu

sendiri. Provinsi Riau telah banyak mengeluarkan inovasi-inovasi dalam segala bidang kehidupan yang memang harus dilakukan di rumah. Provinsi Riau merupakan daerah industri yang perekonomiannya sudah bisa dikatakan baik, namun dengan adanya wabah ini banyak masyarakat yang terkena dampak mulai dari kerugian dari pengusaha, pedagang yang bangkrut dan banyaknya karyawan di PHK dari pekerjaannya. Pada dasar semua sektor terdampak oleh Covid-19 ini mulai dari sektor perekonomian, sektor kesehatan dan sektor sosial. Kemudian pula dari segi pelayanan pemerintahan juga banyak terdampak, sebab pelayanan yang biasa masyarakat langsung datang ke kantor-kantor pemerintahan saat ini di tiadakan sebab takutnya akan menjadi cluster baru penyebaran Covid-19 itu sendiri.

Pemerintah Provinsi Riau harus terus mencari cara untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun ditengah pandemi Covid- 19 ini. Sebab apabila tidak ada cara yang tepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan sangat berdampak buruk terhadap masyarakat, pebisnis bahkan pemerintah itu sendiri seiring pula dengan kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi dengan pelayanan pemerintahan itu sendiri.

Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Riau mulai menerapkan E-Government sebagai cara yang tepat dalam pelayanan publik di instansi Pemerintah pada era Covid-19 saat ini. E-Government selalu mengedepankan keterbukaan dan kemudahan terhadap informasi pemerintahan yang dibutuhkan masyarakat. Penerapan E-Government di instansi pemerintahan bisa pula dijadikan sebagai cara yang tepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada era Covid-19 saat ini. Oleh karena itu dibutuhkan faktor-faktor yang mendukung suksesnya penerapan E-Government di instansi pemerintahan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti berinisiatif melakukan sebuah penelitian dengan judul “Elemen Sukses Penerapan E- Government pada era Covid- 19 di Kominfo Riau”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif, karena penelitian ini menggambarkan, menceritakan, dan menguraikan apa yang terjadi atau peristiwa untuk semua maksud dan tujuan. Menurut Sugiyono (2013:49-53) penelitian deskriptif tidak direncanakan untuk menguji teori-teori tertentu, namun hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, efek samping atau keadaan. Dengan demikian, penelitian kualitatif dengan metode deskriptif merupakan strategi eksplorasi yang berencana untuk membuat penggambaran secara grafis atau disengaja, dari atas ke bawah dan tepat dari realitas saat ini dan hubungan antara kekhasan yang dipertimbangkan.

Berangkat dari penggambaran tersebut, eksplorasi ini diharapkan dapat mengarahkan pengejaran, penggambaran, dan pengkajian terhadap Elemen Sukses Penerapan E-Government di Kominfo Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan E-Government di Kominfo Riau

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain, didalamnya melibatkan otomisasi dan komputerisasi pada prosedur paper based yang akan mendorong cara baru dalam kepemimpinan, cara baru dalam mendiskusikan dan menetapkan strategi, cara baru dalam transaksi bisnis, cara baru dalam mendengarkan warga dan komunitas, serta cara baru dalam mengorganisasi dan menyampaikan informasi.

Terdapat beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Kominfo Riau dengan beberapa dimensi, yaitu sebagai berikut:

1. Inovasi (Dimensi Smart Governace), terdapat 140 inovasi pada dimensi smart governance, namun yang paling unggul ialah:

a. Pekanbaru Learning Center

Adalah platform Learning Management System (LMS) yang digunakan untuk pengembangan kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

- b. Smart Tax
Adalah layanan berbasis mobile untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) melaporkan/mendaftarkan pajak, mengecek tagihan, mencetak SPPT PBB dan mel.
 - c. Klinik Inovasi dan Kelitbangan (Klik BPP)
Klik BPP merupakan layanan publik dalam bentuk fasilitas inovasi dan kelitbangan yang bertujuan untuk:
 - 1) Sarana konsultasi untuk menumbuhkan ide inovasi Perangkat Daerah.
 - 2) Menjaring isu actual atau permasalahan di Perangkat Daerah dan mendapatkan rekomendasi pemecahan masalahnya melalui riset/kelitbangan.
 - 3) Konsultasi keberlanjutan inovasi Perangkat Daerah yang stagnan.
 - 4) Sarana publikasi dan promosi inovasi daerah.
 - d. Kenali Aksi Dukcapil (Kerjasama Pelayanan Keliling Akta Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk Dukcapil)
Merupakan kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekanbaru bersama dengan aparaturnya kecamatan dan kelurahan, hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang berlokasi pada tempat dan waktu yang sudah ditemukan, oleh pihak kecamatan dan kelurahan.
2. Inovasi (Dimensi Smart Society), terdapat 98 inovasi pada dimensi smart society, namun yang paling unggul ialah:
 - a. Membara (Membaca Buku Bersuara)
Merupakan kegiatan mengenalkan dunia literasi kepada anak-anak sedini mungkin melalui media suara yaitu dengan membaca buku tanpa perlu dibaca. Format buku audio ini memberikan keleluasaan bagi pembaca untuk menikmati buku-buku dengan seru dan menyenangkan.
 - b. Sipenduduk (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kependudukan)
Merupakan sistem informasi yang dikelola disdukcapil dalam melayani berkas administrasi kependudukan masyarakat.
 3. Inovasi (Dimensi Smart Environment), terdapat 8 inovasi pada dimensi smart environment.
 4. Inovasi (Dimensi Smart Economy), terdapat 28 inovasi pada dimensi smart economy.

5. Inovasi (Dimensi Smart Living), terdapat 17 inovasi pada dimensi smart living, namun yang paling unggul ialah:
 - a. Smart Rescue
Merupakan layanan tanggap darurat pemadaman kebakaran yang terintegrasi dengan PLN, Polisi dan stakeholder lainnya dalam upaya meminimalisir kerugian dan korban serta untuk memenuhi standar waktu tanggap (respon time) dalam melakukan pemadaman kebakaran 15 menit.
 - b. Desinfektan Otomatis pada Trans Metro Pekanbaru
Untuk pencegahan penyebaran covid-19 pada bus Transmetro Pekanbaru (TMP) yaitu berupa penyemprotan disinfektan secara otomatis ketika bus berhenti di halte ujung koridor.
 - c. Smart Lighting
Bagian dari manajemen pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) untuk mewujudkan efisiensi pemakaian daya listrik dan biaya penerangan jalan melalui teknologi nirkabel (wireless).
 - d. E-Respon
Layanan tanggapan/respon terhadap keluhan masyarakat yang berkaitan dengan gangguan kenyamanan yang menjadi urusan pemerintahan.
6. Inovasi (Dimensi Smart Branding), terdapat 5 inovasi pada dimensi *smart branding*, namun yang paling unggul ialah:
 - a. Pekanbaru Investment Centre (PIC)
PIC merupakan platform untuk menyediakan informasi oleh para pelaku usaha atau investor baik sebelum maupun sesudah berinvestasi di Pekanbaru. PIC memuat beragam informasi diantaranya informasi seputar potensi investasi dan sistem informasi berbasis geografis, peta penyesuaian tata ruang, laporan data penanaman modal, serta informasi UMKM.
 - b. Mal Pelayanan Publik
MPP dirancang oleh KEMEPAN RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik yang berbagai jenis pelayanan pada satu tempat, penyederhanaan dan prosedur serta integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai

jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik.

Kendala Penerapan E-Government di Kominfo Riau

Dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan di Kominfo Riau dengan menerapkan sistem E-Government terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaannya. Ada sejumlah hambatan yang ditemui penulis dilapangan berdasarkan pengamatan serta wawancara yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi

Berdasarkan pengamatan penulis, dalam penerapan e-government masih terdapatnya hambatan terkait kurang pemahannya sumber daya manusia dalam mengaplikasikan berbagai inovasi yang telah dibuat oleh Kominfo Riau.

2. Disposisi

Berdasarkan pengamatan penulis, masih minimnya sikap yang dimiliki oleh para pegawai di Kominfo Riau, dimana belum terdapat hubungan yang harmonis, baik itu antara sesama pegawai maupun pegawai dengan atasan. Hal ini yang menjadi hambatan bagi para pegawai dalam bekerja.

3. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan pengamatan penulis, penyediaan sarana dan prasarana masih belum maksimal bahkan ketersediaan fasilitas penunjang sistem elektronik government masih relatif kurang.

4. Kemudahan Akses Layanan

Berdasarkan pengamatan penulis, karena sangat mudahnya masyarakat dalam mengakses informasi layanan di Kominfo Riau, sehingga hal ini membuat tidak adanya kerahasiaan mengenai data masyarakat dan bisa menyebabkan adanya kebocoran data.

5. Jaringan Internet

Berdasarkan pengamatan penulis, karena sebagian masyarakat masih banyak yang tinggal di pedesaan serta jauh dari jangkauan internet sehingga masyarakat sulit menggunakan berbagai inovasi elektronik yang telah dibuat oleh Kominfo Riau.

Upaya Mengatasi Kendala Penerapan E-Government di Kominfo Riau

1. Komunikasi

Terkait dengan masih banyaknya sumber daya manusia yang kurang paham dalam mengaplikasikan berbagai inovasi yang telah dibuat oleh Kominfo Riau, maka upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat selaku sumber daya manusia mengenai tata cara pengaplikasian berbagai inovasi tersebut sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Disposisi

Terkait dengan masih minimnya sikap yang dimiliki oleh para pegawai di Kominfo Riau, dimana belum terdapat hubungan yang harmonis, baik itu antara sesama pegawai maupun antara pegawai dengan atasan maka upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menumbuhkan rasa hormat serta saling menghargai antar sesama pegawai maupun pegawai dengan atasan, hal ini akan memberikan rasa nyaman dan sikap toleransi dalam dunia pekerjaan.

3. Sarana dan Prasarana

Terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang masih belum maksimal bahkan ketersediaan fasilitas penunjang sistem elektronik government masih relatif kurang, maka upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menambah dan memaksimalkan fasilitas penunjang sistem elektronik government sehingga pelaksanaan pelayanan online dapat berjalan dengan baik dan semestinya.

4. Kemudahan Akses Layanan

Terkait dengan sangat mudahnya masyarakat dalam mengakses informasi layanan di Kominfo Riau, sehingga hal ini membuat tidak adanya kerahasiaan mengenai data masyarakat dan bisa menyebabkan adanya kebocoran data. Maka upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan meningkatkan sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik sehingga oknum-oknum tidak bertanggung jawab tidak mudah mendapatkan data rahasia masyarakat.

5. Jaringan Internet

Terkait karena sebagian masyarakat masih banyak yang tinggal di pedesaan serta jauh dari jangkauan internet. Maka upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal

tersebut adalah dengan mengusahakan pembangunan tower di pedesaan agar seluruh masyarakat dapat merasakan berbagai inovasi elektronik yang telah dibuat oleh Kominfo Riau.

KESIMPULAN

Dalam upaya meningkatkan kesuksesan penerapan E-Government di Provinsi Riau, Diskominfo Riau melakukan inovasi-inovasi dalam pemerintahan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. Inovasi-inovasi ini antara lain: *Pertama*, menerapkan inovasi dimensi smart governance yang terdapat 140 inovasi dengan 4 inovasi unggulan. *Kedua*, menerapkan inovasi dimensi smart society yang terdapat 98 inovasi unggulan dengan 2 inovasi unggulan. *Ketiga*, menerapkan inovasi dimensi smart environment dengan 8 inovasi. *Keempat*, menerapkan inovasi dimensi smart economy dengan 28 inovasi. *Kelima*, menerapkan inovasi dimensi smart living dengan 17 inovasi. Dan *keenam*, menerapkan inovasi dimensi smart branding dengan 5 inovasi dan 2 inovasi unggulan.

Dalam penerapan E-Government ini Kominfo Riau menemukan beberapa kendala yang dapat mengganggu keberlangsungan inovasi tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi itu yaitu: masih terdapatnya hambatan terkait kurang pahalannya sumber daya manusia dalam mengaplikasikan berbagai inovasi yang telah dibuat Kominfo Riau, masih minimnya sikap yang dimiliki oleh para pegawai di Kominfo Riau, penyediaan sarana dan prasarana yang masih belum maksimal, sangat mudahnya masyarakat dalam mengakses informasi layanan di Kominfo Riau sehingga membuat tidak adanya kerahasiaan mengenai data masyarakat dan bisa menyebabkan adanya kebocoran data, serta masih adanya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan sehingga jauh dari jangkauan internet.

DAFTAR REFERENSI

- Fazila, Meisya. 2021. *Peran Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Dalam Aktivitas Sosialisasi Vaksin Covid-19 di Kota Dumai. Skripsi.* Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Khoirunisa. Siti. 2021. *Optimalisasi Penggunaan Website Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Skripsi.* Riau : UIN Suska Riau.
- Misnawati, M. (2022). *Teori Ekopuitika untuk Penelitian Sastra Lisan.* Drestanta Pelita Indonesia Press.
- Misnawati, M., Poerwadi, P., Nurachmana, A., Veniaty, S., Lestaringtyas, S. R., Christy, N. A., ... & Rahmawati, S. (2022). *The Ekopuitika Theory.* International Journal of Education and Literature, 1(1), 54-62.
- Nurhakim, Mochamad Ridwan Satya. 2014. *Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern.* *Jurnal Ilmu Administrasi.* 11(3), hal 403-422
- Perdana, I., & Misnawati, M. P. (2019). *Cinta dan Bangga Berbahasa Indonesia di Perguruan Tinggi.* SPASI MEDIA.
- Perdana, I. Misnawati. 2021. *Evaluasi Pembelajaran.*
- Poerwadi, P., & Misnawati, M. P. *Deder dan Identitas Kultural Masyarakat Dayak Ngaju.* GUEPEDIA.
- Rahmatullah, A. S., & Ghufron, S. (2021). *The Effectiveness Of'facebook'as Indonesian Language Learning Media For Elementary School Student: Distance Learning Solutions In The Era Of The Covid-19 Pandemic.* MULTICULTURAL EDUCATION, 7(04), 27-37.
- Rinto Alexandro, M. M., Misnawati, M. P., & Wahidin, M. P. (2021). *Profesi Keguruan (Menjadi Guru Profesional).* Gue.
- Rusli, Zaili. 2018. *Strategi Penerapan E-Government di Kota Pekanbaru.* *Jurnal Ilmu Administrasi Publik FISIP UNRI.* 5(1), hal 1-13 Silaban, Armin Antoni. 2019. *Implementasi Sistem E-Government Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Tesis.* Pekanbaru : Universitas Islam Riau
- Salsabila, S., Syamsir, M. S., Putri, A. N., & Rahmayanti, A. (2022). *Analisis Dampak Perkuliahan Daring (Online) pada Saat Pandemi Terhadap Hubungan Sosial Mahasiswa Universitas Negeri Padang.* ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 3(1), 122-250.

Simanullang, P. (2022). *Application of Introduction To Personality Psychology 5 Genetic Intelligence Through The Concept of Stifin Test*. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 3(1), 100-109.

Supriatin, Y. M., & Istiana, I. I. (2022, November). *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Sinar Resmi sebagai Identitas Bangsa*. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA* (Vol. 1, No. 2, pp. 01-14).

Usop, L. S. (2020). *Peran Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju untuk Melestarikan Pahewan (Hutan suci) di Kalimantan Tengah*. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 1(1), 89-95.

Wahyuni, Fitri. Angraini. 2015. *Evaluasi Penerapan E-Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Menggunakan Pendekatan Metode Pegi*. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*. 1(1), hal 39-43

Wiyanto, M. S., Misnawati, M., & Dwiyaniti, D. R. (2022). *Penerapan Strategi Penolakan dalam Komunikasi Pembelajaran Bahasa Inggris antara Guru dan Siswa di SMK PGRI 1 Jombang*. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(2), 3076-3084.

Yahya, Erisman. 2022. *Ini Upaya Riau Untuk Percepatan Transformasi Digital*. Diakses tanggal 15 November 2022, dari diskominfotik.riau.go.id

Dokumen:

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (telekomunikasi, media dan informatika)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government

PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah.